OPTIMALISASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nabil Fasha Al-Mumtaz
NPP. 33.0244
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Email: fasha.almumtaz@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Arnold Poli, SH, M.AP
Email: arnoldpoli1963@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *The author focuses on the problem of the number of IKD activations in Palembang City which is still far from the target set by the Directorate General of Civil Registration of the Ministry of Home Affairs, namely 30% of those who have recorded their e-KTP, socialization and outreach efforts that have not been able to reach all levels of society, and the existence of fraudulent methods in the name of IKD activation.* ***Purpose:*** *The aim of this study is to determine the description of the optimization of IKD carried out by the Palembang City Population and Civil Registration Office.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection involved interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive and snowball sampling techniques. Data analysis was performed using ATLAS.ti software, which the researcher then analyzed, presented, and drew conclusions.* ***Result:*** *The research findings indicate that based on an analysis using three dimensions of optimization according to Siringoringo (2005), namely objectives, alternative decisions, and resources, it is known that in the objective dimension, the achievement of IKD ownership in Palembang City is still at 14.44 percent and has not reached the national target of 30 percent. In the alternative decision dimension, service implementation through outreach programs and socialization has been carried out, but its implementation has not reached all levels of society. Meanwhile, in the resource dimension, there are still limitations in the form of the number of officers that is not commensurate with the service load, unequal smartphone ownership, and facilities and infrastructure that still need to be improved. Factors inhibiting the implementation of IKD activation include the existence of fraud modes, limited facilities and infrastructure, and low public outreach and awareness. To overcome these obstacles, the Palembang City Population and Civil Registration Office has made efforts in the form of providing education to the community, maintaining and improving the quality of facilities and infrastructure, and expanding outreach.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of IKD activation in Palembang City is still not optimal. It is recommended that cooperation with regional banks is needed to reach a wider community, the preparation of regulations for the use of IKD in public services, and the improvement of facilities and outreach so that IKD ownership can be more optimal.*
Keywords: *Activation; Digital Population Identity; Optimization.*

ABSTRAK

Permasalahan: Penulis berfokus pada permasalahan jumlah aktivasi IKD di Kota Palembang yang masih jauh dari target yang ditetapkan Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri yaitu 30% dari yang telah melakukan perekaman KTP-El, upaya sosialisasi dan jemput bola yang belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta adanya modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran optimalisasi IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Palembang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan Informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball* sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menggunakan *software* ATLAS.ti yang kemudian peneliti analisis, sajikan, serta tarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis menggunakan tiga dimensi optimalisasi menurut Siringoringo (2005), yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya, diketahui bahwa pada dimensi tujuan pencapaian kepemilikan IKD di Kota Palembang masih berada pada angka 14,44 persen dan belum mencapai target nasional sebesar 30 persen. Pada dimensi alternatif keputusan, pelaksanaan pelayanan melalui program jemput bola dan sosialisasi telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, pada dimensi sumber daya masih terdapat keterbatasan berupa jumlah petugas yang belum sebanding dengan beban pelayanan, kepemilikan smartphone yang belum merata, serta sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan. Adapun faktor penghambat pelaksanaan aktivasi IKD meliputi adanya modus penipuan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Disdukcapil Kota Palembang telah melakukan upaya berupa memberikan edukasi kepada masyarakat, pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta perluasan sosialisasi. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan aktivasi IKD di Kota Palembang masih belum optimal. Adapun saran penelitian ini yakni diperlukan kerja sama dengan bank daerah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, penyusunan regulasi pemanfaatan IKD dalam pelayanan publik, serta peningkatan fasilitas dan sosialisasi agar kepemilikan IKD dapat lebih optimal

Kata kunci: Aktivasi; Identitas Kependudukan Digital; Optimalisasi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia terutama di bidang pemerintahan. Perkembangan tersebut menuntut pemerintah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dengan mengadopsi sistem administrasi berbasis digital yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta keamanan dalam akses layanan bagi masyarakat. *Citizens expect governments to act proactively by initiating appropriate government services themselves* (Scholta et al., 2019). Salah satu sektor pelayanan publik yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan administrasi kependudukan menjadi tulang punggung bagi fungsi negara dalam mengelola data kependudukan dan menyediakan layanan publik lainnya yang efisien (Munawaroh & Riaji, 2024). Pada perkembangan teknologi identifikasi modern, metode pengumpulan data biometrik mengalami

kemajuan yang signifikan seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem verifikasi yang lebih akurat dan efisien. *In the second half of the 20th century, there was a breakthrough in biometric data collection thanks to innovations in voice, iris, and facial recognition technology* (Jain & Rangaswamy, 2020).

Berbagai negara telah mengembangkan sistem identitas digital sebagai bagian dari upaya modernisasi administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. *Aadhaar is a biometric identification system using a 12-digit number that has been in use in India since 2009, it was implemented by the Indian government as a unique identification system for Indian citizens* (MC & Shanmugam, 2025). Sejalan dengan perkembangan tersebut, Indonesia mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai upaya transformasi digital dalam administrasi kependudukan, sehingga masyarakat dapat mengakses identitas dan dokumen kependudukan secara lebih mudah, cepat, dan aman melalui perangkat digital. *Digital identity systems appear as part of the digital infrastructure that enables individuals to participate in society as digital citizens* (Spiliotopoulos et al., 2023). Pemanfaatan teknologi dalam proses pengelolaan administrasi dan pemberian layanan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan (Hutasoit et al., 2024). Identitas Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai jawaban atas berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia. Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) hadir sebagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan dalam pengelolaan dokumen kependudukan, seperti risiko kehilangan, kerusakan, maupun pemalsuan dokumen yang sering menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi kependudukan (Gatiningsih, Risnawati, et al., 2025).

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 mencapai 286.693,8 jiwa, dengan penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-El sebesar 205.170.185 jiwa dari wajib perekaman KTP-El sebesar 212.513.093 jiwa atau 96,54% penduduk telah melakukan perekaman KTP-El (dukcapil.kemendagri.go.id, 2025). Adapun data aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) nasional berdasarkan data dari *Geographic Information System* (GIS) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri hingga tahun 2024 sebesar 13.104.930 jiwa atau 6,3% dari total jumlah perekaman KTP-El. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri menetapkan target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia ialah 30% dari wajib KTP-El yang sudah terekam.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menyebutkan jumlah penduduk Kota Palembang tahun 2025 sebesar 1.814.716 jiwa, penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-El sebesar 1.286.451 dari 1.306.783 penduduk wajib rekam KTP-El. Jumlah aktivasi IKD di Kota Palembang baru sebesar 152.518 atau 11,83% dari penduduk wajib KTP-El yang sudah melakukan perekaman. Berarti masih ada sebanyak 233.748 jiwa atau 18,17% penduduk Kota Palembang yang belum melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dapat tercapai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang telah melakukan berbagai upaya seperti program jemput bola ke instansi pemerintah, pelayanan *Goes To School* dan *Goes To Campus*, serta membuka layanan di mall. Namun, cakupan dan intensitas pelayanan tersebut belum mampu menjangkau kelompok masyarakat lanjut usia serta warga berpenghasilan rendah karena sebagian besar belum memiliki *smartphone* dan bahkan masih terbiasa dengan pelayanan administrasi kependudukan secara manual. Rendahnya aktivasi IKD disebabkan

salah satunya oleh masih adanya masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia, yang belum memiliki *smartphone* (transsumsel.com, 2025).

Meskipun IKD telah gencar dikenalkan kepada masyarakat sejak tahun 2022, ternyata masih banyak masyarakat Kota Palembang yang belum memiliki dan bahkan mengetahui tentang program tersebut. Sehingga sudah hampir tiga tahun program ini berjalan jumlah aktivasi IKD di Kota Palembang belum mencapai target 30% dari jumlah perekaman KTP-El sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Hal ini sejalan dengan pendapat Nair dan Eskici yang mengatakan "*Low state capacity makes it difficult for governments in developing countries to deliver resources"* (Nair & Eskici, 2022). Bahwa keterbatasan kapasitas pemerintah dapat menjadi hambatan dalam menjangkau masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan suatu program pelayanan publik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan rendahnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang, sementara itu IKD merupakan salah satu inovasi penting dalam transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang bertujuan untuk mempermudah akses layanan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat keamanan data kependudukan masyarakat. Fenomena yang terjadi di Kota Palembang, menunjukkan masih rendahnya aktivasi IKD meskipun Kota Palembang merupakan ibu kota provinsi dengan dukungan infrastruktur pelayanan publik yang relatif lebih baik dibandingkan daerah lain. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi daerah sebagai pusat pemerintahan dan capaian implementasi program IKD di lapangan.

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya aktivasi IKD di Kota Palembang ini. Salah satunya adalah adanya masyarakat yang menerima pesan, panggilan, atau ajakan melalui *whatsapp* yang mengatasnamakan aktivasi IKD dan meminta data pribadi, sehingga menimbulkan keraguan, kekhawatiran, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program IKD. Modus pelaku penipuan meminta masyarakat untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara daring melalui WhatsApp atau telepon, sekaligus meminta data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan informasi lainnya (ampera.co, 2024).

Masih terdapat warga terutama kelompok lanjut usia yang belum memiliki smartphone dan sebagian lainnya masih terbiasa menggunakan pelayanan administrasi kependudukan secara manual, sehingga memperlambat proses adaptasi terhadap layanan digital. *Smartphone ownership and usage among older adults are still hindered by various barriers, creating a digital divide that results in low utilization of technology-based services* (Choudrie et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD. Meskipun berbagai studi telah membahas hambatan pelaksanaan IKD, seperti keterbatasan sumber daya, akses teknologi, dan rendahnya literasi digital, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji rendahnya kepercayaan masyarakat akibat adanya modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD dan belum optimalnya aktivasi IKD di Kota Palembang, khususnya dalam memahami dinamika pelaksanaan program oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bagian dari agenda transformasi digital pelayanan publik yang saat ini sedang berlangsung dan membutuhkan evaluasi yang berbasis kondisi lapangan. Secara keilmuan, penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian yang secara spesifik membahas optimalisasi aktivasi IKD

dalam konteks daerah perkotaan dengan karakteristik sosial yang kompleks, terutama ketika hambatannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat, literasi digital, dan keamanan informasi seperti modus penipuan yang masif dimasayarakat. Secara praktis, penelitian ini penting bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang serta pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan dasar perumusan strategi yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan memahami hambatan nyata di lapangan, menyusun langkah sosialisasi yang lebih efektif, memperkuat perlindungan informasi publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk kepentingan akademik, tetapi juga memiliki manfaat langsung dalam mendukung perbaikan layanan publik dan pencapaian target aktivasi IKD secara berkelanjutan. .

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas implementasi dan optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baik dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan maupun pelayanan publik lainnya. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai IKD memiliki variasi fokus, metode, serta pendekatan yang digunakan. Zainudin mengkaji Identitas Kependudukan Digital untuk mendukung transformasi digital di Indonesia menggunakan metode pendekatan campuran (*mixed-methods*), yang berfokus pada strategi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang perlu diarahkan pada integrasi IKD dengan layanan publik (Zainudin, 2025). Nurrahman dkk meneliti efektivitas program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Ciamis menggunakan metode kualitatif serta pendekatan deskriptif untuk mengukur ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program yang berfokus pada efektivitas program IKD (Nurrahman et al., 2025). Penelitian Gatiningsih dkk membahas analisis pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kota Bandung menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan berdasarkan teori kualitas layanan publik Zeithaml dengan lima dimensi, yaitu *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy*, yang berfokus pada pelaksanaan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (Gatiningsih, Prihandono, et al., 2025). Selanjutnya, Roso Sri Rejeki dkk juga mengkaji analisis pencapaian target nasional pada bidang administrasi kependudukan salah satu nya adalah Identitas Kependudukan Digital menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan analisis SWOT (Roso Sri Rejeki et al., 2025). Adapun Amalia dan Hartono meneliti penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teori inovasi yaitu: keuntungan relative, kesesuaian, kerumitan, kemudahan diamati, dan kemungkinan untuk diterapkan. Penelitian ini berfokus mengenai penerapan Identitas Kependudukan Digital (Amalia & Hartono, 2024). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi metode kualitatif dengan beragam pendekatan teoritis serta variasi karakteristik objek penelitian yang berbeda-beda sesuai fokus kajian masing-masing.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dilihat dari segi konteks objek penelitian yang dilakukan, yakni optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang menjadi isu penting dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena berfokus pada optimalisasi program IKD di Kota Palembang yang merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan dengan karakteristik masyarakat kota yang heterogen serta tingkat pemanfaatan layanan digital yang beragam dan fasilitas pelayanan publik yang

seharusnya lebih baik dari daerah sekitar. Selain itu, pengukuran, indikator, dan teori yang digunakan peneliti juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Siringoringo yang menyatakan ada tiga elemen optimalisasi yang harus diidentifikasi yakni: tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi (Siringoringo, 2005). Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai pelaksanaan aktivasi IKD di Kota Palembang.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk mengkaji objek dalam kondisi yang alami (Sugiyono, 2022). Jenis penelitian deskriptif karena dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan berupa deskripsi dalam bentuk kalimat dari hasil pengamatan yang mencakup wawancara dengan informan, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Pemilihan pendekatan ini didasarkan karena metode kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali dan mendeskripsikan suatu fenomena secara mendalam guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan aktivasi IKD di Kota Palembang.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang merupakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan instrumen kunci karena memiliki kewenangan kebijakan dan pengambil keputusan utama dalam pelaksanaan aktivasi IKD di Disdukcapil Kota Palembang, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Kepala Seksi Identitas Penduduk, Administrator Database Kependudukan, operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan masyarakat Kota Palembang yang memiliki *smartphone*. Pemilihan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan informan yang ditunjuk penulis anggap paling tahu terkait permasalahan yang diteliti berdasarkan wawasan dan pengetahuan narasumber yang berhubungan dengan topik penelitian. Sedangkan dalam pengambilan sampel di masyarakat, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu dengan memilih beberapa orang untuk dijadikan informan tetapi jika data yang diberikan belum lengkap penulis mencari informan lain yang dapat melengkapi data yang diberikan orang sebelumnya sampai menghasilkan data yang dibutuhkan penulis. Kombinasi informan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang utuh dari sisi pengambil kebijakan, pelaksana, dan pengguna Identitas Kependudukan Digital.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti, perangkat lunak ini tergolong dalam kategori *Computer-Aided Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS), yang juga dikenal sebagai *Qualitative Data Analysis Software* (QDA), yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu proses analisis data kualitatif secara sistematis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

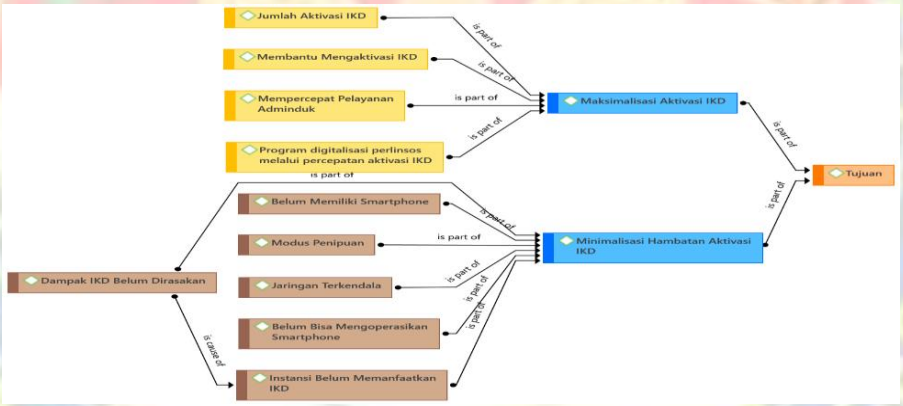
(1) Membuat HU (*Heurmeunistic Unit*), (2) *Input* data dengan membuat beberapa PD (*Primary Document*), (3) Memilih data dan membuat beberapa *quotation*, (4) Memberikan *coding*, (5) Membuat suatu gambaran *network*, dan (6) Menghasilkan suatu *output*.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, yang menjadi lokasi Program Lorong Literasi. Pengumpulan data dilakukan selama 19 hari yaitu pada tanggal 5 Januari hingga 24 Januari 2026, yang mencakup proses observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumentasi pelaksanaan kegiatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sesuai dengan dinamika yang sedang berjalan di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menggunakan pendapat dari Siringoringo yang menyatakan terdapat tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang dibatasi (Siringoringo, 2005). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Tujuan



Gambar 3.1
Interpretasi Analisis Dimensi Tujuan
Sumber: Diolah Penulis Menggunakan Software ATLAS.ti (2026)

Berdasarkan hasil observasi yang telah dianalisis menggunakan aplikasi ATLAS.ti yang menghasilkan peta jaringan pada gambar tersebut, tujuan optimalisasi dibangun melalui dua indikator utama, yaitu maksimalisasi aktivasi IKD dan minimalisasi hambatan aktivasi IKD. Kedua indikator tersebut saling berkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan program aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang lebih optimal. Pada tahun 2022 pemerintah pusat memberikan target cakupan aktivasi IKD sebesar 25%, kemudian target ini dinaikan menjadi 30% pada tahun 2024 dari jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP-El. Hingga Akhir Januari tahun 2026 jumlah aktivasi IKD di Kota Palembang sebanyak 187.084 aktivasi atau persentase nya sebesar 14,44% dari 1.297.253 penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-El. Berikut ini tabel jumlah aktivasi IKD per kecamatan di Kota palembang.

Tabel 3.1
Jumlah Aktivasi IKD Per Kecamatan di Kota Palembang s.d Bulan Januari Tahun 2026

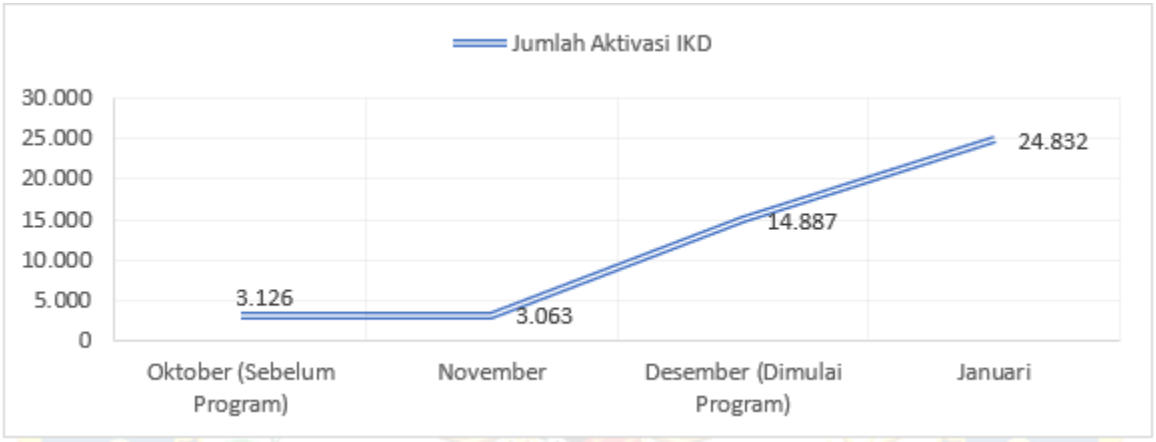
No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP-El Yang Sudah Merekam	Jumlah Aktivasi IKD	Persentase (%)
1	Ilir Barat Dua	50.338	7.327	14,56
2	Seberang Ulu Satu	68.356	14.166	20,72
3	Seberang Ulu Dua	75.982	11.193	14,73
4	Ilir Barat Satu	112.404	16.998	15,12
5	Ilir Timur Satu	50.287	7.415	14,75
6	Ilir Timur Dua	61.684	7.881	12,78
7	Sukarami	150.837	25.035	16,60
8	Sako	84.468	17.487	20,70
9	Kemuning	59.750	9.491	15,88
10	Kalidoni	96.055	12.719	13,24
11	Bukitkecil	28.248	4.668	16,53
12	Gandus	59.953	8.516	14,20
13	Kertapati	70.164	14.937	21,29
14	Plaju	71.662	11.289	15,75
15	Alang-Alang Lebar	84.490	13.915	16,47
16	Sematangborang	50.470	11.495	22,78
17	Jakabaring	67.383	10.670	15,83
18	Ilir Timur Tiga	54.722	7.981	14,58
	Total	**1.297.253**	**187.084**	**14,44**

Sumber: Diolah Penulis dari Disdukcapil Kota Palembang (2026)

Saat ini Disdukcapil Kota Palembang sedang melakukan jemput bola program digitalisasi perlinsos melalui percepatan aktivasi IKD disetiap kantor kelurahan. Program ini mewajibkan aktivasi IKD sebagai syarat pendaftaran program digitalisasi perlinsos (Perlinsos) dari Kementrian Sosial. Lebih lanjut ditegaskan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang mengatakan "Saat ini kami sedang bekerja sama dengan dinas sosial guna mendukung program digitalisasi perlinsos yang difokuskan disetiap kelurahan dan kecamatan untuk melakukan percepatan Aktivasi IKD".

Pada periode Oktober dan November, jumlah aktivasi masih relatif rendah dan belum mengalami kenaikan berarti, yang menggambarkan bahwa sebelum partisipasi masyarakat masih terbatas. Setelah Disdukcapil meningkatkan sosialisasi secara lebih aktif serta melakukan jemput bola ke kelurahan dan kecamatan, jumlah aktivasi mulai naik tajam pada Desember dan kembali meningkat pada Januari. Gambar di bawah ini menunjukan peningkatan jumlah kepemilikan IKD di Kota Palembang setelah Disdukcapil melakukan kerjasama Program Digitalisasi Perlinsos melalui

percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak pertama kali diluncurkan pada bulan Desember tahun 2025.

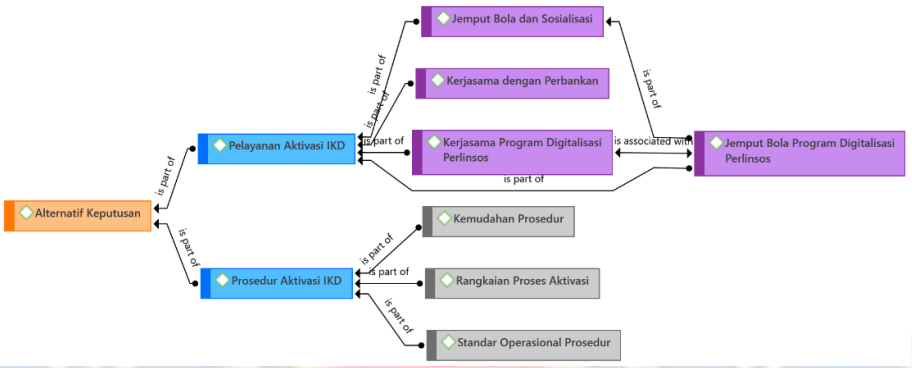


Gambar 3.2
Peningkatan Jumlah Kepemilikan IKD dari Bulan Oktober Tahun 2025 - Januari 2026
Sumber: Diolah Penulis dari Disdukcapil Kota Palembang (2026)

Berdasarkan gambar di atas menunjukan peningkatan sangat signifikan dalam kepemilikan IKD di Kota Palembang sejak dimulai nya Program Digitalisasi Perlinsos melalui percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang mengatakan bahwa ”Sebelum adanya program digitatlisasi perlinsos jumlah aktivasi IKD hanya berkisar antara 100 hingga 200 orang setiap harinya. Namun, saat ini jumlah aktivasi meningkat tajam hingga mencapai sekitar 1.000 aktivasi per hari. Lonjakan ini dipengaruhi oleh kebijakan yang menjadikan aktivasi IKD sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial”.

Hasil observasi penulis dilapangan menunjukan kendala jaringan yang sering terjadi ketika melakukan aktivasi IKD ialah ketika permintaan yang meningkat, jaringan/server dari SIAK langsung *down* dan terhenti sehingga memperlambat petugas untuk mengaktivasi dan masyarakat harus menunggu lebih lama. Program digitalisasi perlinsos ini kebanyakan menyasar lansia yang dimana para lansia ini belum bisa mengoperasikan bahkan tidak memiliki *smartphone* untuk melakukan aktivasi IKD. Salah satu yang menjadi hambatan dalam mempercepat pelaksanaan aktivasi IKD ialah adanya modus penipuan di masyarakat. Bentuk modus penipuan berkedok aktivasi IKD yang paling sering dilaporkan adalah pelaku menghubungi masyarakat melalui telepon, WhatsApp, SMS, atau video call lalu mengaku sebagai petugas Dukcapil untuk menawarkan bantuan aktivasi IKD. Setelah itu, pelaku meminta data pribadi seperti NIK, nomor KK, foto KTP, atau kode OTP, bahkan ada yang mengirim tautan atau formulir palsu yang menyerupai aplikasi IKD. Pola ini tergolong *vishing* atau *voice phishing*, yaitu penipuan dengan memanfaatkan manipulasi psikologis agar korban menyerahkan data sensitif. Aktivasi IKD sendiri tidak dilakukan melalui telepon atau WhatsApp, melainkan melalui tatap muka di layanan Dukcapil yang sah.

3.2. Alternatif Keputusan



Gambar 3.3
Interpretasi Analisis Dimensi Alternatif Keputusan
Sumber: Diolah Penulis Menggunakan Software ATLAS.ti (2026)

Berdasarkan hasil observasi yang dianalisis menggunakan aplikasi ATLAS.ti pada gambar tersebut, dapat diketahui bahwa alternatif keputusan dalam optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Palembang terdiri atas dua indikator utama, yaitu pelayanan aktivasi IKD dan prosedur aktivasi IKD. Pada indikator pelayanan aktivasi IKD, hasil observasi menunjukkan adanya beberapa bentuk upaya yang dilakukan, yaitu jemput bola dan sosialisasi, kerja sama dengan perbankan, kerja sama program digitalisasi perlinsos, serta jemput bola program digitalisasi perlinsos. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang melihat bahwasanya pengguna *smartphone* terbanyak saat ini adalah kalangan anak muda. Maka dari itu disdukcapil melakukan upaya program jemput bola ke sekolah dan universitas yang dinamakan ”Dukcapil Goes To School” dan ”Dukcapil Goes To Campus”. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk yang mengatakan bahwa ”Disdukcapil Kota Palembang melakukan upaya pelayanan jemput bola yang menyasar pelajar dan mahasiswa yang dimana saat ini merupakan pengguna smartphone terbanyak untuk melakukan aktivasi IKD. Maka dari itu kami disdukcapil Kota Palembang melakukan program jemput bola ke sekolah dan universitas yang diberi nama program *Dukcapil Goes To School* dan *Dukcapil Goes To Campus”*.

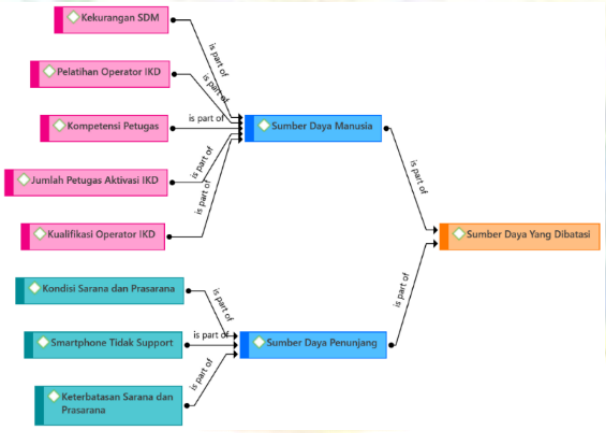
Kerjasama Bank Negara Indonesia (BNI) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipahami sebagai bentuk kerja sama pemanfaatan data kependudukan dalam rangka mendukung proses verifikasi identitas nasabah dan belum dalam bentuk regulasi atau aturan. pemanfaatan IKD ini memungkinkan proses pembukaan rekening, pembaruan data nasabah, hingga akses layanan keuangan lainnya menjadi lebih cepat, efisien, dan aman, karena berbasis pada data kependudukan yang terintegrasi secara nasional. Prosedur aktivasi IKD merupakan rangkaian proses yang diperlukan untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Prosedur ini dirancang secara sistematis agar bertujuan meminimalkan kesalahan dan potensi penyalahgunaan data. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang merumuskan prosedur aktivasi IKD dalam sebuah gambar Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.

NO	KEGIATAN	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Aktivasi IKD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan instalasi Identitas Kependudukan Digital pada telepon genggamnya dan mengisi NIK, email, no Hp, serta melakukan swafoto		ya	Telpon pintar, kuota/wifi, Jaringan Internet, Email, sudah melakukan perekaman KTP-el	5 menit	Aplikasi Identitas Kependudukan Digital	
2	Petugas membantu pemohon melakukan scan QR Code pada telepon genggam ke aplikasi SIAK untuk mendapatkan kode aktivasi	tidak		Telpon pintar, kuota/wifi, Jaringan Internet, Email, sudah melakukan perekaman KTP-el, aplikasi SIAK	5 menit	Kode aktivasi melalui email pemohon	
3	Mendapatkan notifikasi melalui email untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital			Telpon pintar, kuota/wifi, Jaringan Internet, Email	5 menit	IKD sudah diaktivasi	
4	Identitas Kependudukan Digital sudah aktif dan dapat digunakan			Telpon pintar, kuota/wifi, Jaringan Internet	5 menit	Identitas Kependudukan Digital	

Gambar 3.4
Standar Operasional Prosedur Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Sumber: Diolah Penulis Dari Disdukcapil Kota Palembang (2026)

Gambar tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menunjukkan alur proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan secara bertahap mulai dari pendaftaran awal sampai IKD berhasil aktif dan dapat digunakan. Proses aktivasi IKD diawali dengan instalasi aplikasi, pengisian data diri, dan swafoto oleh pemohon. Selanjutnya, petugas membantu melakukan pemindaian QR code melalui aplikasi SIAK untuk memperoleh kode aktivasi. Setelah proses tersebut, pemohon menerima notifikasi melalui email sebagai tanda bahwa aktivasi sedang atau telah diproses. Apabila seluruh tahapan dan persyaratan terpenuhi, IKD akan aktif dan dapat digunakan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien.

3.3. Sumber Daya Yang Dibatasi



Gambar 3.5
Interpretasi Analisis Dimensi Sumber Daya Yang Dibatasi

Sumber daya manusia merujuk pada jumlah dan kemampuan petugas atau pegawai dalam menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan khususnya operator aktivasi IKD. Adapun

sumber daya penunjang ialah ketersediaan sarana prasarana dan infrastruktur yang menunjang proses pelayanan IKD. Sumber daya manusia merupakan komponen yang krusial dalam pelayanan administrasi kependudukan. Peran utamanya ialah sebagai *front office* yang melayani dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD. Hasil observasi di lapangan menunjukan pelaksanaan aktivasi IKD di Disdukcapil Kota Palembang berjalan dengan cukup lancar karena petugas yang terlibat tidak dibatasi oleh persyaratan khusus. Selama petugas tersebut mampu mengoperasikan SIAK, mereka dapat berperan sebagai operator dalam proses aktivasi IKD, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih fleksibel.

Kondisi yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang menunjukkan adanya keterbatasan jumlah pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja serta tuntutan pelayanan yang terus meningkat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mengatakan ”Jumlah petugas atau operator IKD yang kita miliki masih kurang sebab permintaan masyarakat untuk aktivasi IKD melalui jemput bola program digitalisasi perlinsos ini meningkat pesat”. Kota Palembang sendiri sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki akses internet yang sudah baik dengan penyebaran internet yang sudah merata di setiap wilayah Kota Palembang. Akan tetapi yang menjadi persoalan dalam melakukan aktivasi IKD ialah server atau jaringan yang ada pada aplikasi SIAK terkadang mengalami gangguan akibat jumlah permintaan yang banyak pada satu waktu sehingga membuat pelayanan terganggu dan masyarakat harus lama menunggu sampai jaringan kembali normal.

Proses untuk aktivasi IKD ada persyaratan minimum yang harus diperhatikan yakni: masyarakat harus sudah melakukan perekaman KTP-el, memiliki *smartphone* yang terintegrasi dengan Android (minimal versi 8) / IOS yang kompatibel dengan aplikasi IKD, serta akses jaringan yang memadai. Meskipun pelayanan telah berjalan cukup baik dengan dukungan pegawai yang telah dilatih untuk mengoperasikan SIAK, peningkatan permintaan masyarakat melalui program digitalisasi perlinsos menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang tersedia masih terbatas. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana, gangguan jaringan, serta belum meratanya kesiapan perangkat digital masyarakat juga menjadi hambatan dalam optimalisasi aktivasi IKD.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Aktivasi IKD di Kota Palembang telah berjalan cukup baik dimana Disdukcapil telah melakukan jemput bola, sosialisasi, dan kerja sama lintas sektor untuk memanfaatkan IKD, namun belum didukung sumber daya yang memadai. Penulis menemukan temuan penting yakni capaian kepemilikan IKD yang baru mencapai 14,44 persen dari target nasional 30 persen. Hambatan utama masih terletak pada keterbatasan petugas, sarana prasarana, jaringan, dan rendahnya literasi serta kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan temuan Herfina Amalia dan Toni Hartono (Amalia & Hartono, 2024) bahwa penerapan IKD di Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai harapan karena rendahnya pemahaman masyarakat, aplikasi dinilai rumit, dan masih sering terjadi error. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut karena di Kota Palembang masalah utama juga terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat dan belum maksimalnya pemanfaatan IKD dalam layanan publik.

Berbeda dengan temuan penelitian Roso Sri Rejeki dkk (Roso Sri Rejeki et al., 2025) di Tidore Kepulauan yang menekankan hambatan geografis, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, anggaran, dan ketersediaan blanko KTP-el, penelitian ini menemukan bahwa hambatan di Palembang lebih banyak bersumber pada modus penipuan, keterbatasan sarana prasarana, kepemilikan smartphone yang belum merata, serta rendahnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, temuan ini menolak asumsi bahwa hambatan utama IKD selalu bersifat geografis, karena dalam konteks Palembang hambatan justru lebih menonjol pada aspek sosial, persepsi keamanan data, dan kesiapan sumber daya pelayanan

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Gatiningsih dan Prihandono dkk (Gatiningsih, Prihandono, et al., 2025) di Bandung yang menunjukkan bahwa capaian aktivasi IKD masih rendah dan sangat dipengaruhi oleh literasi digital, kepercayaan publik, serta reliabilitas sistem. Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan IKD tidak cukup hanya ditopang oleh fasilitas layanan yang tersedia, tetapi harus diikuti oleh keandalan sistem, kesiapan perangkat pengguna, dan rasa aman masyarakat terhadap perlindungan data. Layaknya hasil penelitian Nurrahman dkk (Nurrahman et al., 2025), penelitian ini juga menunjukkan bahwa sosialisasi, pemantauan program, dan dukungan aparatur menjadi unsur penting dalam mendorong efektivitas IKD. Nurrahman menemukan bahwa program IKD di Ciamis berlangsung cukup baik karena didukung sosialisasi offline dan online, pemantauan rutin, serta kesiapan SDM, meskipun masih menghadapi kendala anggaran, infrastruktur jaringan, dan kesenjangan digital. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi sekaligus menunjukkan perbedaan tingkat keberhasilan, karena di Palembang kendala sumber daya dan kepercayaan publik masih lebih dominan sehingga optimalisasi belum mencapai kondisi yang benar-benar efektif.

Sejalan dengan Zainudin (Zainudin, 2025), penelitian ini menegaskan bahwa IKD belum sepenuhnya mampu menjadi penggerak transformasi digital apabila belum terintegrasi secara luas dalam pelayanan publik. Zainudin menekankan pentingnya integrasi IKD dengan layanan publik, kolaborasi lintas sektor, regulasi yang responsif, literasi digital, dan perlindungan data pribadi. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut karena di Palembang IKD baru memberi dampak terbatas, terutama pada program digitalisasi perlinsos dan layanan perbankan, sedangkan pemanfaatannya dalam layanan publik secara luas masih belum optimal. Karakteristik yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya program digitalisasi perlindungan sosial yang diintegrasikan dengan pelayanan aktivasi IKD. Melalui program tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan bantuan sosial sekaligus memperoleh pendampingan aktivasi IKD. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi layanan administrasi kependudukan dengan program pemerintah lainnya mampu meningkatkan jangkauan pelayanan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD.

Berikut adalah beberapa temuan penting terkait oleh beberapa peneliti terdahulu terkait program Identitas Kependudukan Digital (IKD):

a. Sosialisasi dan pelayanan jemput bola menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan aktivasi IKD;
b. Integrasi aktivasi IKD dengan program digitalisasi perlindungan sosial mampu memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat;
c. Rendahnya kesadaran masyarakat dan belum meratanya kepemilikan smartphone masih menjadi hambatan dalam peningkatan aktivasi IKD;
d. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana memengaruhi optimalisasi pelayanan aktivasi IKD;
e. Modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat;

f. Kolaborasi lintas sektor dan penguatan literasi digital menjadi strategi penting untuk meningkatkan capaian aktivasi IKD di masa mendatang.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa optimalisasi aktivasi IKD bukan hanya persoalan menambah jumlah aktivasi, tetapi juga menyangkut kemudahan prosedur, ketersediaan sumber daya, dan kepercayaan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya sekaligus memberikan penegasan baru bahwa pada konteks Kota Palembang, keberhasilan IKD sangat ditentukan oleh kemampuan Disdukcapil menghubungkan sosialisasi, pelayanan aktif, dan dukungan sumber daya secara berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa faktor penghambat optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yakni adanya modus penipuan yang mengatasnamakan aktivasi IKD, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivasi IKD.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwaoptimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dengan mengacu pada teori optimalisasi Siringoringo (2005), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan aktivasi IKD di Kota Palembang masih belum optimal. Dari ketiga dimensi optimalisasi, dimensi alternatif keputusan merupakan dimensi yang paling optimal dalam penyelenggaraan aktivasi IKD di Kota Palembang. Hal ini terlihat dari program digitalisasi perlinsos yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD. Sedangkan dimensi sumber daya yang dibatasi merupakan dimensi yang paling belum optimal, karena masih terdapat keterbatasan pada jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kapasitas pelayanan yang belum mampu mengimbangi meningkatnya permintaan masyarakat terhadap aktivasi IKD. Meskipun dimensi alternatif keputusan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama melalui program digitalisasi perlinsos yang mampu mendorong partisipasi masyarakat, capaian tersebut belum diikuti oleh dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, keterbatasan pada dimensi sumber daya menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi aktivasi IKD di Kota Palembang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Keterbatasan lain terletak pada dinamika kebijakan dan capaian program IKD yang dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga temuan penelitian ini menggambarkan kondisi pada saat penelitian dilakukan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji optimalisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya pada satu daerah, tetapi juga pada beberapa kota atau kabupaten dengan karakteristik sosial dan tingkat kesiapan digital yang berbeda. Kajian berikutnya juga dapat memperdalam analisis dari sisi masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga dapat diketahui lebih rinci faktor-faktor yang memengaruhi minat, kepercayaan, dan kesiapan masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amalia, H., & Hartono, T. (2024). Public Service Innovation: Diffusion Study of Innovation Using Digital Population Identity (IKD) Application in Pekanbaru City. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, *8*(2), 117–130. https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/2196

ampera.co. (2024). *Disdukcapil Palembang Ingatkan Masyarakat Waspada Penipuan Aktivasi IKD*. https://www.ampera.co/baca/disdukcapil-palembang-ingatkan-masyarakat-waspada-penipuan-aktivasi-ikd/

Choudrie, J., Pheeraphuttranghkoon, S., & Davari, S. (2020). The Digital Divide and Older Adult Population Adoption, Use and Diffusion of Mobile Phones: a Quantitative Study. *Information Systems Frontiers*, *22*(3), 673–695. https://doi.org/10.1007/s10796-018-9875-2

dukcapil.kemendagri.go.id. (2025). *Kemendagri Rilis Jumlah Penduduk Indonesia 286 Juta Jiwa, Laki-Laki Lebih Banyak dari Perempuan*. Https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/kemendagri-rilis-jumlah-penduduk-indonesia-286-juta-jiwa-laki-laki-lebih-banyak-dari-perempuan

Gatiningsih, G., Prihandono, A., Kurniasih, D., & Giyarsih, S. R. (2025). ANALYSIS OF DIGITAL POPULATION IDENTITY SERVICES IN BANDUNG CITY. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *15*(2), 130–140. https://doi.org/10.33701/JIWBP.V15I2.5953

Gatiningsih, Risnawati, A., Ilham, M., Nafis Calyca, A., Munte, R., Justitia Simanjuntak, S., & Pasya Aleandra, M. (2025). Spatial Distribution of Digital Population Identity (IKD) Ownership in Sumedang Regency. *International Conference on Sustainable Environment and Innovation (ICoSEI)*, *1*. https://doi.org/https://doi.org/10.53675/icosei.v1i1.1615

Hutasoit, I., Madjid, U., Ripa'i, A., & Sri Rejeki, W. R. (2024). Pelayanan Surat Keterangan Pindah Bagi Penduduk Migran Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, *12*(1), 1–19. https://doi.org/10.34010/agregasi.v12i1.12535

Jain, S., & Rangaswamy, N. (2020). Good Digital Identity: The Case of Aadhaar in India. *COMPASS 2020 - Proceedings of the 2020 3rd ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable Societies*, 345–346. https://doi.org/10.1145/3378393.3402290

MC, A., & Shanmugam, K. (2025). Implementing unique identification technology: The journey and success story of Aadhaar in India. *Journal of Information Technology Teaching Cases*, *15*(1), 31–36. https://doi.org/10.1177/20438869231200286

Munawaroh, N., & Riaji, I. A. R. (2024). "DUKCAPIL GOES TO SCHOOL" SEBAGAI INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN E-KTP OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *8*(2), 25–36. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1428

Nair, A., & Eskici, B. (2022). Digital Public Services: The Development of Biometric Authentication in India. In *Introduction to Development Engineering: A Framework with Applications from the Field* (pp. 553–561). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86065-3_20

Nurrahman, A., Sabaruddin, Nurnawati, E. N., & Guntoro, D. (2025). Efektivitas Program Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Ciamis. *Jurnal Registratie*, *7*(2), 143–157. https://doi.org/10.33701/JURNALREGISTRATIE.V7I2.5942

Roso Sri Rejeki, W., Hutasoit, I., & Indramayu. (2025). PENCAPAIAN TARGET NASIONAL PADA BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TIDORE KEPULAUAN. *Jurnal Konstituen*, *7*(1), 87–103. https://doi.org/10.33701/JK.V7I1.5389

Scholta, H., Mertens, W., Kowalkiewicz, M., & Becker, J. (2019). From one-stop shop to no-stop shop: An e-government stage model. *Government Information Quarterly*, *36*(1), 11–26. https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2018.11.010

Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional : pemrograman linear*. Graha Ilmu.

Spiliotopoulos, T., Sheik, A. T., Gottardello, D., & Dover, R. (2023). Onboarding Citizens to Digital Identity Systems (Extended Abstract). *IET Conference Proceedings*, *2023*(14), 77–81. https://doi.org/10.1049/icp.2023.2575

Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (2nd ed.). ALFABETA.

transsumsel.com. (2025). *Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan*. https://www.transsumsel.com/aktivasi-ikd-jadi-modus-penipuan/

Zainudin, Z. (2025). Digital ID Policy in Support of Digital Transformation in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *17*(1), 1–18. https://doi.org/10.21787/JBP.17.2025.1-18